

**STRATEGI PEMERINTAH DESA TERKAIT REALISASI DESA WISATA DI DESA NEGLAWANGI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG****Rendy Adiwilaga<sup>1</sup> dan Ujud Rusdia<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Bale Bandung<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: rendyadiwilaga@gmail.com, ujudrusdia@unibba.ac.id

**ABSTRAK.** Desa Neglawangi terbilang menjadi sebuah lokus yang menarik untuk dikaji, mengingat desa tersebut 70% wilayahnya merupakan perkebunan teh yang dikelola langsung oleh PTPN, serta hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani. Selebihnya hanya 30% wilayahnya yang digunakan sebagai pemukiman warga setempat. Selain itu, Desa Neglawangi sejatinya tidak memiliki aset bersifat strategis seperti halnya pasar desa dan lain sebagainya, namun yang menarik, Desa Neglawangi memiliki *master plan* dalam mewujudkan desa wisata dengan target capaian 2021 (diundur menjadi 2025 karena kendala pandemi covid-19) dengan memanfaatkan titik-titik wisata yang mampu dieksploitasi menjadi komoditas kearifan lokal yang mampu berpotensi mengundang wisatawan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori strategi Bintoro Tjokroamidjojo, dengan pembedahan masalah melalui metode kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis SWOT sebagai upaya *social mapping* yang ditempuh melalui observasi panjang selama 2 bulan, yang dikombinasikan dengan indikator-indikator Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengacu pada Pedoman Pengembangan Destinasi Wisata Perdesaan, yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata. Poin indikator tersebut yakni identitas, perwilayahan, daya tarik wisata, kegiatan, aksesibilitas, amenitas, masyarakat/penduduk, investasi, usaha pariwisata, kelembagaan, dan terakhir pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Neglawangi memiliki potensi besar seperti ragam titik wisata alam, wisata historis, dan wisata budaya. Namun rencana pengembangan lokasi wisata berbenturan dengan pihak-pihak lain seperti BKSDA dan Lembaga pecinta alam lainnya karena beberapa destinasi wisata merupakan cagar alam. Operasionalisasi pun masih terkendala oleh pergantian tampuk kekuasaan di ranah Provinsi dan Kabupaten yang berimplikasi pada alokasi anggaran pembangunan dari luar. Karena jika mengandalkan Dana Desa, Desa Wisata sulit terwujud karena memerlukan logistik yang besar.

**Kata kunci:** Strategi, Pemerintah Desa, Desa Wisata, Desa Emas

**VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY RELATED TO THE REALIZATION OF VILLAGE TOUR IN NEGLAWANGI VILLAGE, KERTASARI SUB-DISTRICT, BANDUNG DISTRICT**

**ABSTRACT.** Neglawangi Village is an interesting locus to study, considering that 70% of its territory is a tea plantation managed directly by PTPN, as well as a protected forest managed by Perhutani. The remaining 30% of the area is used as a settlement for local residents. In addition, Neglawangi Village actually does not have strategic assets like village markets and so on, but interestingly, Neglawangi Village has a master plan in realizing a tourist village with a target of 2021 (postponed to 2025 due to the covid-19 pandemic constraints) by utilizing points - tourist points that can be exploited into commodities of local wisdom that can potentially attract tourists. This research was studied using the Bintoro Tjokroamidjojo strategy theory, with problem dissection through descriptive qualitative methods combined with SWOT analysis as a social mapping effort taken through long observations for 2 months, combined with tourism destination development indicators that refer to the Destination Development Guidelines. Rural Tourism, formulated by the Ministry of Tourism. The indicator points are identity, zoning, tourist attraction, activities, accessibility, amenities, community / population, investment, tourism businesses, institutions, and finally marketing. The results showed that Neglawangi Village has great potential such as various natural tourism points, historical tourism, and cultural tourism. However, plans for developing tourist sites collide with other parties such as the BKSDA and other nature lovers organizations because some tourist destinations are nature reserves. Operationalization is still hampered by changes in the reins of power in the provincial and district domains which have implications for external development budget allocations. Because if you rely on the Village Fund, the Tourism Village is difficult to materialize because it requires large logistics.

**Key words;** Strategy, Village Government, Tourism Village, Gold Village

## PENDAHULUAN

Di Era globalisasi seperti sekarang ini, setiap Negara dituntut untuk menghadirkan kondisi kehidupan ekonomi dan sosial yang bersifat efektif, efisien, dan kompetitif, karena pada hakikatnya, tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan gagasan-gagasan, serta langkah gerak masyarakat aktif dalam membangun desa yang lebih baik.

Saat ini, strategi pembangunan di Indonesia dimulai dengan peningkatan pemerataan pembangunan di daerah dan desa. Masyarakat sebagai subyek pembangunan harus memiliki kesadaran untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik, karenanya berangkat dari hal tersebut, maka diharapkan terlaksana sebuah program-program yang muncul untuk mencapai apa yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Dalam upaya tersebut maka keaktifan pemerintahan desa dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah pedesaan selalu identik dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Namun seiring dorongan pemerataan, Desa kini semakin tumbuh menjadi wilayah potensial yang mampu menyerap pendapatan negara, salah satunya ialah melalui sektor wisata.

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, Desa Wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang sudah ada tetapi lebih cenderung kepada penggalan potensi desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa (mewakili dan dioperasikan oleh penduduk desa) yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi rangkaian aktivitas pariwisata, serta mampu menyediakan

dan memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukungnya.

Salah satu desa yang berpotensi besar pengembangan wisatanya ialah Desa Neglawangi. Desa Neglawangi merupakan desa yang jauh dari pusat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Desa Neglawangi sendiri berjarak sejauh 4 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor (dari pusat kota Kabupaten Bandung) dan berada pada wilayah terluar Kabupaten Bandung, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut melalui Gunung Papandayan dan Cagar Alam Tegal Panjang. Walaupun menjadi wilayah terjauh, namun Neglawangi memiliki potensi besar khususnya dalam pengembangan wisata.

Potensi yang ada di Desa Neglawangi selama ini masih belum optimal pengembangannya, padahal di sisi lain, Neglawangi memiliki keanekaragaman wisata panorama yang cukup kaya. Selain itu, 30 % pemukiman di Neglawangi umumnya merupakan rumah tua peninggalan Belanda yang usianya bahkan lebih tua dari usia republik. Neglawangi juga menjadi salah satu akses strategis menuju Gunung Papandayan dengan panorama kebun teh sedep yang luas, serta ragam masyarakat yang sangat ramah terhadap pendatang.

Desa Neglawangi menjadi sebuah lokus yang menarik karena Desa ini, hampir 70% wilayahnya merupakan perkebunan teh dan sepenuhnya berada di kawasan BUMN, yakni PERHUTANI sehingga untuk membangun berbagai aspek pembangunan perlu adanya perizinan kepada pihak tersebut. Namun Pemerintah Desa memiliki *goodwill* yang sangat kuat dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat merespon positif upaya ini, ditambah banyaknya potensi seperti obyek wisata Tegal Panjang, pesona alam perkebunan teh sedep, rumah-rumah peninggalan sejarah, embung air, dan lain-lain, dimana kesemuanya berkesempatan mengembangkan ekonomi masyarakat. Salah satunya upaya yang telah dilakukan warga yakni dengan membuat fasilitas seperti *Rest Area*, serta Pujasera (pusat

jajanan serba ada) yang dapat ditemui di pusat-pusat objek wisata.

Namun di sisi lain, upaya pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Neglawangi memiliki hambatan yang cukup vital dan signifikan. Salah satunya ialah pemerintah Desa terlalu bergantung pada bantuan tambahan pada anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi seperti halnya pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Maka ketika politik berjalan dengan dinamis di ranah provinsi saja, sedikit banyak sejatinya dapat mempengaruhi arah pembangunan dan berimbas pada Desa Neglawangi.

Selain itu, destinasi-destinasi unggulan Pemerintah Desa Neglawangi seperti halnya Tegal Panjang dan Tegal Alun, sejatinya merupakan wilayah konservasi cagar alam di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)<sup>1</sup> dimana untuk masuk ke wilayah-wilayah tersebut harus menggunakan surat keterangan. Peruntukannya pun hanya untuk penelitian, dan pendidikan pelatihan dasar (Diklatsar) yang umumnya diselenggarakan oleh Wanadri dan Lembaga resmi lainnya. Sehingga jelas, jika wilayah konservasi tersebut diperuntukkan untuk wilayah pariwisata, maka Lembaga-lembaga tersebut akan bersikeras menentang rencana tersebut.

Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut, kemudian peneliti hendak mengkaji bagaimana strategi pemerintah desa Neglawangi, dengan berbagai kondisi yang mengitari Desa Neglawangi, berusaha untuk mewujudkan Neglawangi sebagai salah satu desa wisata yang terpadu di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah desa dalam upayanya merealisasikan desa Neglawangi sebagai desa wisata, yaitu:

1. Bidang politik, secara sistematis, Pemerintah Desa Neglawangi khususnya dalam upaya merealisasikan Neglawangi

sebagai desa wisata, terlalu bergantung kepada situasi politik di tataran yang lebih tinggi, yakni dinamika politik di tingkat provinsi dan Kabupaten.

2. Bidang kemasyarakatan, walaupun masyarakat Desa Neglawangi terbilang masyarakat yang ramah dan terbuka kepada pendatang, namun sayangnya, umumnya masyarakat Neglawangi tidak terlalu menganggap bahwa pendidikan penting, sehingga pada prosesnya kemudian, Desa Neglawangi tidak memiliki SDM yang memiliki *expertise* di bidang pariwisata, UMKM, serta pemasaran;
3. Bidang ekonomi-sosial, saat ini PTPN dan bisnis kebun teh tengah mengalami *collapse* menuju tidur panjang. Kondisi ini berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya bekerja sebagai buruh petik teh.
4. Bidang fisik, infrastruktur di wilayah Neglawangi terbilang sangat buruk. 2 KM jalan memanjang dari gerbang Desa Neglawangi rusak dan berbatu. Pun halnya sebelumnya, jalan penghubung dari Desa Santosa ke Neglawangi juga kondisinya memprihatinkan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka kemudian dapat dirumuskan sebuah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan strategi Pemerintah Desa terkait realisasi Neglawangi sebagai desa wisata, yakni: Bagaimana strategi pemerintah desa terkait realisasi Neglawangi sebagai desa wisata?

Adapun tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimanakah strategi pemerintah desa terkait realisasi Neglawangi sebagai desa wisata.

## LANDASAN TEORI

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai target atau tujuan yang

<sup>1</sup>BKSDA merupakan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

telah ditentukan sebelumnya. Banyak aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik dalam rangka pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan aspek-aspek lain yang penting dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti beragam rencana yang telah dipersiapkan pemerintah, diperlukan strategi yang akan memberikan arahan tindakan atas kebijakan dan program yang telah disusun sebelumnya.

Di dalam konsep strategi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1980), terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penentuan tujuan atau sasaran, aspek perumusan kebijakan dan yang terakhir aspek operasionalisasi. Ketiga aspek ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat sehingga alternatif-alternatif yang ditetapkan pemerintah tidak bebas nilai.

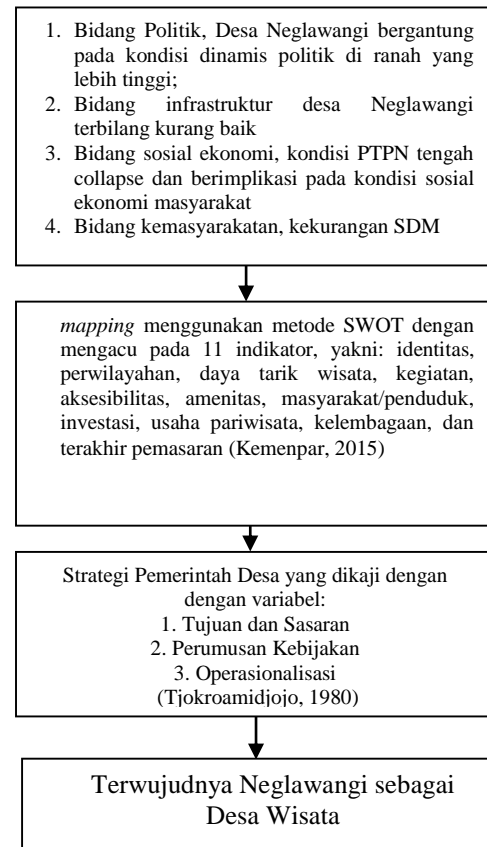
Dalam penelitian ini, strategi pemerintah berfokus pada realisasi perencanaannya mewujudkan suatu desa menjadi desa wisata. Berbicara tentang desa wisata, Desa wisata merupakan pengembangan dari suatu desa yang memiliki potensi wisata dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan. Selain itu, alam dan lingkungan pedesaan yang masih asli dan terjaga menjadi salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata. Melalui desa wisata, berbagai aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa, tetapi justru memperkuat kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, baik kekhasan budaya maupun alamnya.

Kementerian Pariwisata pada tahun 2015 kemudian merumuskan indikator-indikator Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengacu pada Pedoman Pengembangan Destinasi Wisata Perdesaan. Poin indikator tersebut yakni identitas, perwilayahan, daya tarik wisata, kegiatan, aksesibilitas, amenitas, masyarakat/penduduk, investasi, usaha pariwisata, kelembagaan, dan terakhir pemasaran (Kemenpar, 2015). Ke-11 indikator tersebut dalam proses selanjutnya peneliti kaji

melalui analisis SWOT guna mencapai hasil maksimal sebagai upaya *mapping* di wilayah Neglawangi.

Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini yang disusun oleh peneliti:

### Bagan 1. Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis, 2020

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian mengacu pada penelitian studi kasus. Menurut Simangunsong (2016: 193) penelitian kualitatif pemerintahan jenis studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan tema yang menjadi studi kasus pemerintahan, dalam artian bukan berarti kasus-kasus deviasi yang ada di dalam pemerintahan.

Masih dalam Simangunsong, penelitian kualitatif sendiri memiliki pandangan bahwa fokus sebuah penelitian terletak pada pencarian makna (*meanings*) sehingga harus disadari bahwa makna yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi “tema-tema yang bersifat

subyektif dan jamak” (Simangunsong, 2016: 192).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada di lapangan pada saat penelitian sedang berlangsung. Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh suatu rumusan pemecahan masalah yang dihadapi atau yang sedang diteliti.

Selain menggunakan studi kasus, peneliti juga menggunakan analisis SWOT dalam upaya melakukan *social mapping* di wilayah Neglawangi. Analisis SWOT menurut Philip Kotler (2009: 63) diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2013: 19), analisis SWOT diartikan sebagai: “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*)”.

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan

dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sebagian besar wilayah Desa Neglawangi merupakan wilayah perkebunan dan tanahnya milih Perhutani. Dari sekitar 4.447.400 Ha luas total wilayah Desa Neglawangi, sebanyak 2.334.780 Ha merupakan tanah perkebunan dan sebesar 2.033.820 Ha digunakan sebagai hutan lindung. Hanya sekitar 78.800 Ha wilayah Desa Neglawangi yang dijadikan fasilitas umum seperti halnya pemukiman, serta bangunan-bangunan lainnya yang diberdayakan untuk kemaslahatan masyarakat (data Internal Desa Neglawangi, 2020). Penelitian ini berlokasi secara fokus pada seluruh wilayah Neglawangi terkhusus di Kantor Desa Neglawangi. Berikut merupakan rumah tema penelitian yang disusun oleh penulis:

**Tabel 1. Rumah Tema Penelitian**

Judul Penelitian	Tema	Sub Tema	Informan
Strategi Pemerintah Desa Terkait Realisasi Neglawangi sebagai Desa Wisata di Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.	Strategi teknis pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan desa wisata	kesiapan Pemerintah Desa Neglawangi dalam mewujudkan Desa Wisata menggunakan analisis SWOT terhadap 11 indikator pengembangan destinasi wisata	1. Kepala Desa Neglawangi 2. Tim Pembangunan Desa yang terdiri dari: Ketua LPMD, ketua BPD, Sekretaris Desa, perwakilan PTPN, Perwakilan Perhutani, Linmas, dan PKK 3. Ketua Karang Taruna 4. Para Kepala Dusun

		Strategi Pemerintah Desa Neglawangi menggunakan variabel Tujuan dan Sasaran, Perumusan Kebijakan, dan operasionalisasi	1. Kepala Desa Neglawangi 2. Tim Pembangunan Desa yang terdiri dari: Ketua LPMD, ketua BPD, Sekretaris Desa, perwakilan PTPN, Perwakilan Perhutani, Linmas, dan PKK 3. Ketua Karang Taruna
--	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis, 2020

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis SWOT Kesiapan Desa Neglawangi terkait Realisasi Neglawangi sebagai Desa Wisata

Selain melakukan observasi semi-etnografis dan melakukan *in-depth interview* (Creswell, 2013), peneliti juga melakukan *focus group discussion* dengan para *stakeholder* Desa Neglawangi yang terdiri dari Kepala Desa, hingga tim Pembangunan Desa yang beranggotakan Ketua BPD, Ketua LPMD, Karang Taruna, serta beberapa pihak yang terlibat dalam perumusan desa wisata. Namun dalam kegiatan FGD, peneliti mencoba menggali potensi dan kesiapan dari Desa Neglawangi dengan menggunakan metode SWOT (*strength, Weakness, Opportunity, & Threat*) (Rangkuti, 2013), dimana metode SWOT tersebut dihadapkan pada indikator-indikator Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengacu pada Pedoman Pengembangan Destinasi Wisata Perdesaan, yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata. Poin indikator tersebut yakni identitas, perwilayahan, daya tarik wisata, kegiatan, aksesibilitas, amenitas, masyarakat/penduduk, investasi, usaha pariwisata, kelembagaan, dan terakhir pemasaran (Kemenpar, 2015). Hasil dari FGD tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. Analisis SWOT terkait Pengembangan Destinasi Desa Wisata di Desa Neglawangi**

No	Unsur	Strength	Weakness	Opportunity	Threat
1	<b>Identitas</b>	1. Cuaca khas perkebunan teh yang dingin menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi masyarakat perkotaan 2. Neglawangi dikenal dengan kebun teh sedep, dan memiliki sisi historis yang panjang serta meninggalkan warisan bangunan Belanda yang cukup beragam	Belum banyak yang mengetahui titik-titik wisata di Neglawangi, Neglawangi dikenal sebagai desa terjauh yang ada di Kabupaten Bandung dan dianggap sebagai desa terpencil		
2	<b>Perwilayahan</b>	Wilayah yang luas menjadikan Neglawangi memiliki ragam eksplorasi titik wisata yang cukup besar			
3	<b>Daya tarik wisata</b>			1. Neglawangi memiliki potensi wisata alam yang potensial jika dikelola dengan baik; 2. Banyaknya titik wisata alam menjadikan Neglawangi mampu bergerak sebagai desa wisata alam serta menjadi jalur penghubung	Beberapa titik wisata yang ditetapkan oleh Desa Neglawangi ditentang oleh para aktivis lingkungan termasuk oleh BKSDA dan Wanadri. Mengingat Tegal Panjang merupakan Cagar Alam yang peruntukannya hanya untuk pelatihan dan penelitian, bukan tempat wisata.

				untuk destinasi yang lebih terkenal yakni Gn. Papandayan	
4	<b>Kegiatan</b>			Walaupun belum dikembangkan, namun Desa Neglawangi memiliki medan yang cocok untuk kegiatan hiking, <i>off-road</i> , serta bersepeda. Selain itu, ada perencanaan menarik dari pihak Desa yang akan mencanangkan pusat wisata “petik pucuk teh sendiri”, mengadopsi dari kegiatan “strawberry petik sendiri” di Ciwidey.	
5	<b>Aksesibilitas</b>		Akses menuju Neglawangi dan di dalam Neglawangi sangat lah buruk. Jalan kondusif hanya berada di depan kantor desa. Selebihnya, bahkan 2 KM dari gerbang desa, jalan berbatu dan kurang layak. Pun halnya di tengah desa, jalan masih	Neglawangi masuk dalam perencanaan pembangunan jalur tengah Pelabuhan Ratu – Pangandaran oleh Provinsi Jawa Barat.	jika selama 5 tahun ke depan kondisi jalan masih sama, diperkirakan pengunjung wisatawan akan berpikir dua kali mengunjungi kembali Neglawangi, karena konsekuensi jalan buruk seperti itu melahirkan pengeluaran baru yakni



			berupa tanah merah, dimana ketika hujan, bisa menjadi kubangan lumpur yang sangat mengganggu		maintenance kendaraan
6	<b>Amenitas</b>			Belum ada informasi pariwisata, akomodasi, penyediaan makanan-minuman, tempat kegiatan dan hiburan, tempat penjualan cenderamata, dan sebagainya.	
7	<b>Masyarakat</b>	Masyarakat yang terbuka dan ramah terhadap pendatang	Kurangnya kualitas SDM dalam aspek pendidikan, juga tidak ada pihak masyarakat yang <i>concern</i> secara keilmuan terhadap permasalahan kepariwisataan		
8	<b>Investasi</b>				<p>1. Pemerintah provinsi belum pernah menggubris terkait ajuan perbaikan jalan, sehingga masyarakat lelah dengan ketidakpedulian pemprov</p> <p>2. PTPN saat ini tengah colapse, sehingga sudah beberapa tahun CSR tidak</p>

					berjalan
9	<b>Usaha pariwisata</b>			Terdapat beberapa komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, yakni sirup terong qori yang sudah mempunyai brand sendiri, teh hitam, & dodol wortel	
10	<b>Kelembagaan</b>	Pemerintah desa solid dalam membangun desa wisata yakni dengan pembentukan tim bangdes yang terdiri dari para <i>stakeholders</i> desa			
11	<b>Pemasaran</b>		Pemerintah Provinsi hingga kecamatan kurang mempromosikan Neglawangi sebagai desa wisata. Terlebih, terdapat tentangan dari BKSDA terkait penetapan Tegal Panjang sebagai destinasi wisata karena Tegal Panjang merupakan Cagar Alam dan hutan lindung		

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas, dapat diperoleh satu simpulan intisari bahwa pada dasarnya, Neglawangi memiliki lokasi-lokasi wisata yang sangat potensial untuk dieksplorasi.

Kebanyakan titik wisata di wilayah Neglawangi adalah wisata alam serta wisata historis. Namun sekali lagi, potensi-potensi tersebut tidak optimal dieksplorasi karena besarnya

STRATEGI PEMERINTAH DESA TERKAIT REALISASI DESA WISATA DI DESA NEGLAWANGI  
KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

Rendy Adiwilaga dan Ujud Rusdia

ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah yang lebih tinggi seperti halnya pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Kebergantungan Pemerintah Desa seperti yang sudah dijelaskan di atas pada hakikatnya cukup beralasan. Pasalnya, Desa memiliki keterbatasan pada penggunaan anggaran dana desa yang pertahun pihak desa terima sebesar 1M. selain itu, beberapa jalur akses yang buruk nyatanya merupakan jalur provinsi. Terlebih lagi, provinsi menjanjikan revitalisasi jalan karena daerah kebun teh sedep masuk dalam rencana pembangunan jalur tengah Pelabuhan Ratu – Pangandaran yang melewati hampir 7 Kota/kabupaten mulai dari Sukabumi – Cianjur – Bandung – Tasikmalaya – Ciarnis – Pangandaran. Sehingga harapan pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan anggaran dana desa menjadi semakin benderang.

Sayang, hingga tahun 2020, realisasi pembangunan revitalisasi akses tersebut belum juga terwujud. Belum terwujud harapan lama, permasalahan baru kemudian muncul kembali, yakni ditetapkannya covid-19 sebagai pandemi global. Otomatis, anggaran desa kemudian dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan covid-19 di wilayah Neglawangi per tahun 2020. Artinya, tahun 2020 pembangunan infrastruktur benar-benar berhenti. Walhasil, target realisasi desa wisata diundur yang tadinya tahun 2021 menjadi tahun 2025.

Pemerintah Desa Neglawangi juga mengalami kendala dalam penetapan titik-titik wisata unggul. Tegal Panjang dan Tegal Alun, yang masuk dalam perencanaan strategis destinasi wisata di Neglawangi, pada temuan peneliti kemudian diketahui bahwa Tegal Panjang merupakan cagar alam yang peruntukannya hanya untuk penelitian dan pendidikan latihan dasar (diklatsar). Bahkan untuk masuk kesana harus mendapat surat izin dari BKSDA. Melihat prosedur yang cukup panjang untuk memasuki Tegal Panjang, akan sangat sulit bagi desa Neglawangi dalam memperjuangkan Tegal Panjang sebagai destinasi unggulan karena bertentangan langsung dengan konservasi alam.

Kemudian terakhir dan tidak kalah penting, yakni masyarakat Neglawangi yang cenderung tidak terlalu menganggap penting pendidikan. Bagi masyarakat, pendidikan tinggi akan terasa percuma juga ilmunya tidak dibangun untuk pengembangan desa. Argumen tersebut berangkat dari adanya tokoh-tokoh lama di masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

### **Strategi Pemerintah Desa terkait Realisasi Neglawangi Sebagai Desa Wisata**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perihal tujuan dan sasaran, secara general, Neglawangi memiliki visi “terwujudnya masyarakat Desa Neglawangi yang lebih sejahtera, mandiri, dan maju melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, amanah, jujur serta berlandaskan iman dan taqwa”. Selain visi, Neglawangi juga memiliki misi, namun disini peneliti hanya menyajikan misi yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, yakni: 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 2. Memperkuat dan mengembangkan basis-basis ekonomi masyarakat; 3. Mengembangkan BUMDES sebagai pilar kekuatan ekonomi masyarakat; 4. Melaksanakan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, seni, budaya dan kearifan lokal, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Perihal pewujudan Desa Neglawangi sebagai desa wisata, direncanakan oleh pemerintah Desa Neglawangi terwujud pada tahun 2021. Namun, dikarenakan pandemi covid-19 yang berimbas pada kebijakan anggaran, serta pertimbangan dinamika politik di tataran yang lebih tinggi yakni pergantian tampuk kepemimpinan di wilayah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat, penetapan Neglawangi sebagai desa wisata diundur menjadi tahun 2025.

Neglawangi sendiri bersikeras mewujudkan Desa Wisata, bertolak dari kondisi

perkebunan teh yang semakin mundur. Padahal, sebagian besar masyarakat menggantungkan nasib pada perkebunan teh karena sebagian besar berprofesi sebagai buruh petik teh. Mundurnya kondisi PTPN sangat terlihat di lingkungan masyarakat desa. Berdasarkan paparan Kepala Desa:

“kalau dulu, dari zaman Belanda, rajanya disini itu mandor kebun teh pak. Kades itu tidak ada harganya disini. Semua tunduk sama mandor. Warga belum tentu dengar RT atau kadus karena kebanyakan RT atau kadus masih teman. Beda kalau mandor yang minta, karena urusannya sama nasib. Tapi sekarang malah terbalik. Perusahaan (PTPN) malah sekarang memohon-mohon sama desa minta dibatukan jalan akses kebun teh yang tanah merah. Terbalik, sekarang kades satu-satunya yang berkuasa (Wawancara dengan Kades Neglawangi pada 2 September 2020 di Kantor Desa Neglawangi)

Melihat kondisi PTPN yang semakin mundur, otomatis pemerintah Desa harus memutar otak agar desanya bisa tetap hidup walau perkebunan teh mulai mundur dan tidur. Optimalisasi sektor wisata kemudian menjadi alternatif paling rasional yang dipilih oleh tim Pembangunan Desa. Sayang, Covid-19 datang

dan perencanaan cukup berantakan. Namun, perencanaan masih berlangsung dan harapan masih terus menyala, terbukti dari diundurnya realisasi peresmian desa wisata menjadi tahun 2025.

### Perumusan Kebijakan dan Operasionalisasi

Dalam menunjang sasaran terwujudnya Neglawangi sebagai desa wisata di tahun 2025, pemerintah Desa Neglawangi kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Secara general, mengacu pada program prioritas 2015-2021, arah kebijakan pembangunan di desa Neglawangi yakni; 1. Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung; 2. Memperbesar alokasi belanja langsung dan bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan; 3. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun bantuan langsung masyarakat yang digulirkan. Per tahun 2015, semenjak Yayan Sunadi menjadi Kepala Desa di Neglawangi, pemerintah Desa bersama tim Pembangunan Desa kemudian merumuskan beberapa program strategis yang disusun guna menunjang terwujudnya Neglawangi sebagai desa wisata. Sekaligus membahas tentang operasionalisasi, berikut beberapa kebijakan yang berkaitan dengan perwujudan Desa Wisata yang dituangkan dalam bentuk tabulasi:

**Tabel 1.3: Realisasi Kebijakan Penunjang Desa Wisata di Desa Neglawangi**

No	Kebijakan	Rencana Anggaran	Realisasi		Keterangan
			Terlaksana	Belum terlaksana	
1	Pembangunan jalan protokol dan drainase dari sedep ke Cibutarua, Papandayan, dan Cisarua	20 M	Baru terlaksana dengan penggunaan anggaran sebesar 2.4 M (2016)	-	Baru terealisasi 10%
2	Pembangunan Tower sinyal	1 M	Dibangun oleh Telkomsel pada tahun 2016, sebelumnya Neglawangi tidak ada sinyal apapun	-	
3	Penerangan jalan protokol	500 Juta	Dalam rentang waktu 2015 – 2020	-	

STRATEGI PEMERINTAH DESA TERKAIT REALISASI DESA WISATA DI DESA NEGLAWANGI  
KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

*Rendy Adiwilaga dan Ujud Rusdia*

			sudah terealisasi sebesar 300 juta		
4	Revitalisasi Gapura dan pengembangan Icon Desa Neglawangi	150 juta	-	Belum terealisasi	Anggaran terpotong untuk penanganan covid-19
5	Perumusan peta lokasi objek wisata	20 Juta	-	Belum terealisasi	Tidak ada nya SDM yang ahli di bidang pemetaan dan minimnya anggaran untuk membayar jasa dari luar desa
6	Penataan taman di tempat penimbangan teh dan peristirahatan di sepanjang jalan utama desa Neglawangi	100 Juta	-	Belum terealisasi	Anggaran terpotong untuk penanganan covid-19
7	Membangun pos penjagaan serta Pusat Informasi Neglawangi (PIN)	50 Juta	-	Belum terealisasi	
8	Pembangunan Rest Area, taman dan penunjuk arah	200 Juta	Proses pembangunan sudah berjalan dan sudah menghabiskan biaya sebesar 100 Juta	-	Pembangunan dibangun dari Dana Desa
9	Pembangunan MCK Komunal	400 Juta	Sudah terbangun	-	Pembangunan berasal dari bantuan Dispersasi Kabupaten Bandung
10	Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)	500 Juta	Sebagian sudah terbangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 170 Juta	-	Pembangunan dibangun melalui Dana Desa
11	Renovasi Rumah Peninggalan Bersejarah (Bekas Rumah Tuan Cyherchop/ Tuan Belanda	170 Juta	Sudah terlaksana	-	Pembangunan dibangun melalui Dana Desa
12	Renovasi rumah singgah wisatawan peninggalan belanda	600 Juta	-	Belum terlaksana	-

13	Pembangunan Bungalow dan akses menuju lokasi Bungalow	260 Juta	-	Belum Terealisasi	
14	Perbaikan jalan menuju PLTA Cibutarua dan PLTA Papandayan peninggalan Belanda	500 Juta	-	Belum Terealisasi	
15	Pengadaan Area <i>Camping Ground</i>	300 Juta	-	Belum terealisasi	
16	Pengadaan Tenda Kemping, Tenda Regu, dan Tenda Peleton	50 Juta	Sudah dibelanjakan sebesar 12 juta pada tahun 2016	-	Bersumber dari Dana Desa
17	Perbaikan dan renovasi bekas bunker persembunyian Belanda (rumah <i>Sinder Afdeling A</i> menuju <i>Sinder Afdeling B, C, dan D +/- 500m</i> di bawah tanah)	200 Juta	-	Belum terealisasi	Perlu konsultasi dengan ahli konservasi dan revitalisasi peninggalan sejarah dari luar
18	Pembangunan area layang gantung (gantole)	200 Juta	-	Belum terealisasi	-
19	Pembangunan Penginapan alternatif ( <i>cottage</i> dan <i>meeting room</i> )		-	Belum terealisasi	
20	Perbaikan akses jalan menuju objek wisata (Tegal Panjang, Kawah Papandayan, dan Gunung Kendeng)	500 Juta	-	Belum terealisasi	
21	Pengembangan lokasi Panjat Tebing dan Curug Gunung Kendeng	200 Juta	-	Belum Terealisasi	
22	Penyediaan Fasilitas jalan <i>offroad</i> , <i>motor cross</i> , sepeda gunung, <i>tea work</i> dan pengadaan kendaraan	1 M	-	Belum terealisasi	
23	Pembangunan <i>flying Fox</i>	100 Juta	-	Belum Terealisasi	
24	Pembangunan Kolam Pemancingan	200 Juta	-	Belum Terealisasi	
25	Pembangunan Sanggar Seni dan Budaya Tradisionil	300 Juta	-	Belum terealisasi	
26	Pengembangan Ternak Ayam Kampung dan Kelinci	100 Juta	-	Belum terealisasi	

27	Pembangunan Pasar tradisional/desa	500 Juta	-	Belum Terealisasi	
28	Pembibitan Tanaman Bunga Hias	500 Juta	-	Belum terealisasi	
29	Peningkatan SDM Kepariwisata	100 Juta	-	Belum terealisasi	Masyarakat kurang begitu menganggap pendidikan sebagai hal penting
30	Peningkatan SDM Tataboga	100 Juta	-	Belum Terealisasi	Masyarakat kurang begitu menganggap pendidikan sebagai hal penting
31	Peningkatan SDM Pemasaran	100 Juta	-	Belum Terealisasi	Masyarakat kurang begitu menganggap pendidikan sebagai hal penting
32	Peningkatan SDM pengemasan, souvenir, cinderamata	100 juta	-	Belum Terealisasi	Kurangnya akses terhadap pakar dalam bidang marketing
33	Peningkatan SDM Lembaga adat, seni dan budaya	100 Juta	-	Belum Terealisasi	

Sumber: Data Pemerintah Desa Neglawangi, diolah kembali oleh peneliti, 2020

Dari data operasionalisasi di atas, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar perencanaan yang sudah diimplementasikan, operasionalisasi kegiatannya diwujudkan melalui dana desa. Adapun bantuan dari luar hanya berasal dari bantuan Dispersasi Kabupaten Bandung, yakni pembangunan MCK komunal. Permasalahan yang paling besar menghambat realisasi program ialah adanya pandemi covid-19 serta minimnya sumber daya manusia terampil yang memiliki *expertise* di bidang pariwisata, maupun pemasaran.

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Neglawangi di luar perencanaan yang sudah dirumuskan oleh Tim Pembangunan Desa, diantaranya ialah seluruh

aparatur desa Neglawangi pernah melakukan studi komparatif ke Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran yang sudah terlebih dahulu lepas landas menuju desa wisata secara resmi. Hasil studi komparatif tersebut lah yang kemudian menjadi catatan penting Tim Bangdes dalam merumuskan program-program strategis pembangunan wisata.

Pemerintah Desa Neglawangi juga merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam menyikapi kekurangan-kekurangan yang gagal direalisasikan dalam implementasi program. Beberapa RTL yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Neglawangi, salah satunya ialah penyusunan ulang proposal izin wisata yang sejatinya sudah dilakukan sejak maret minggu ke 3 di tahun 2016, yang

ditujukan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Namun sekali lagi, semenjak naiknya Ridwan Kamil sebagai Gubernur mengalahkan Deddy Mizwar, tidak ada kunjungan dan janji apapun dari Jabar I untuk *concern* terhadap pembangunan wisata di wilayah Neglawangi.

### KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Neglawangi merupakan Desa dengan keberagaman panorama yang sangat banyak jumlahnya dan berpotensi menyerap wisatawan kota untuk hadir berkunjung menuju desa tersebut. Selain sebagai destinasi wisata alam, Neglawangi juga dapat dieksplorasi sebagai daerah wisata pendukung (akses menuju Papandayan) serta wisata historis karena banyak meninggalkan warisan bangunan Belanda yang sangat elok dan asri, bahkan terawat hingga kini.

Namun kendala dari semua upaya optimalisasi destinasi wisata tersebut ialah yang paling utama yaitu akses. Selain jauh dari pusat kota, nyatanya akses menuju Neglawangi sulit jika hanya ditempuh dengan menggunakan kendaraan biasa, mengingat jalannya yang berbatu dan dilapisi tanah merah dimana ketika hujan jalanan dengan jenis tanah tersebut akan menimbulkan kondisi licin. Selain akses, Neglawangi juga terkendala pada minimnya SDM berkualitas yang memiliki *expertise* di bidang pariwisata maupun pemasaran.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka Pemerintah Desa Neglawangi merumuskan beberapa perencanaan atau strategi agar terealisasi Neglawangi sebagai desa wisata yang ditargetkan pada tahun 2025, diantaranya ialah pembangunan fisik yang penyerapan anggarannya sementara diambil dari alokasi dana desa serta kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Desa Neglawangi selama beberapa tahun terakhir sayangnya hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kondisi pandemi ditambah dengan keterbatasan anggaran serta *political will* yang kurang terkordinasi dengan baik dengan pihak pemerintah yang lebih memiliki otoritas menambah kompleks nya permasalahan

realisasi desa wisata di Neglawangi. Memang beberapa program fisik berhasil dirumuskan, namun sekali lagi, diperlukan pemeliharaan dan pemanfaatan inovatif dari setiap pembangunan fisik yang dibangun dimana kebutuhan tersebut memerlukan sumber daya manusia unggul sebagai kunci keberhasilan Neglawangi sebagai desa wisata di tahun 2025.

### SARAN

Sebaiknya, Pemerintah Desa Neglawangi lebih meyakinkan PTPN maupun Perhutani perihal pengembangan CSR. Karena semundur-mundurnya kondisi perusahaan, perusahaan, terlebih BUMN pasti menganggarkan untuk pengembangan CSR. Selain itu, Pemerintah Neglawangi sebaiknya tidak hanya memikirkan tentang destinasi wisata eksploitasi alam dari perspektif komersil. Karena nyatanya, Neglawangi juga memiliki potensi di bidang budaya. Neglawangi memiliki alternatif dalam pengembangan desa budaya karena pemudanya sendiri aktif dalam kegiatan pengembangan seni budaya sunda seperti tari-tarian dan karawitan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani & Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Byars, Lloyd. L, Leslie W. Rue. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2012. Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Putra, Agus Muriawan. 2006. Konsep Desa Wisata, Jurnal Manajemen Pariwisata (Vol 5. No. 1).
- Salusu, J. 1998. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan



- Organisasi Non-Profit. Jakarta: Grasindo.
- Shahab. 2007. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media.
- Simangunsong, Fernandes, 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gama Media.
- Rangkuti, Freddy. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung.